

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Anggriawan, Rizaldy & Susila, Muh. Endriyo. (2025). Tindak Pidana Siber: Regulasi, Modus Kejahatan, dan Penegakan Hukum. Yogyakarta: Deepublish
- Budiyanto, Dr. (2025). Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Jayapura: Sada Kurnia Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Gosita, Arif. (2018). Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. (1987; reprinted within 2015–2025 editions). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hiariej, Eddy O.S. & Ishaq, H. (2020). Hukum Pidana. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Ilyas, Tengku & Abdullah, Herman & Yunus, Muhammad. (2025). Legal Review of Cyber Crime: Regulatory Challenges and Solutions in Indonesia. Riau: JON Institute.
- Kiki, K. (2025). Tindak Pidana Siber di Indonesia. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. (penting untuk metodologi)
- Mughni Sulubara, Seri, Tasril, Viridya & Nurkhalisah, Nurkhalisah. (2025). Perlindungan Hukum Tindak Pidana Cybercrime dalam Cyberlaw di Indonesia. Medan: Tahta Media.
- Nur Faijah Alkhonsa. (2025). Perlindungan Korban Penipuan Online, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (tesis/monograf).
- Rahardjo, Satjipto. (2006; diguna ulang edisi baru). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.

Simons, J.M. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulubara, Seri Mughni & Tasril, Viridya. (2025). Legal Protection Against Cybercrime from Ransomware Attacks and Cyber Security Bill Evaluation. Aceh: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora (walau jurnal, berdasar penelitian buku).

Titahelu, JAS. (2023). Hukum Cyber. Jakarta: Widina Media Utama.

Unisa. (2025). Buku Referensi Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber. Medan: Media Penerbit Indonesia.

Various (2020–2025). Blackstone's Criminal Practice (36th ed. 2025). Oxford: Oxford University Press. (buku internasional standar tentang praktik pidana)

Hiariej, Eddy O.S. (Editor). (2020). Hukum Acara Pidana: Prinsip dan Mekanisme. Depok: RajaGrafindo Persada.

Artikel Dalam Jurnal

Azis, Muhammad. (2020). "Tantangan Penegakan Hukum Cybercrime di Indonesia." Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(2): 45–46.

Arief, Barda Nawawi. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan di Era Digital." Jurnal Ilmu Hukum, 7(2): 122–130.

Handayani, T. (2019). "Kesenjangan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital." Jurnal Perlindungan Hukum, 6(2): 85–98.

Marlina. (2021). "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying di Media Sosial." Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 12(1): 80–95.

Marlina. (2018). "Pendekatan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber." Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1): 100–115.

Simons, J.M. (2017). "Prinsip Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum Pidana." Jurnal Hukum dan HAM, 13(2): 135–150.

Yuliartini, Ni Putu Rai. (2019) "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, No. 2,

- Yulia, Putri. (2022). "Batas Hukum Antara Penagihan dan Pengancaman." *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 4(3): 60–75.
- Rahmawati, S. (2020). "Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Penagihan Digital." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3): 210–225.
- Pratama, A. R. (2021). "Penegakan Hukum terhadap Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(1): 55–70.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). "Legal Protection for Victims of Cybercrime in Indonesian Criminal Law System." *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9.
- Nugroho, B. A. (2019). "Kejahatan Siber sebagai Ancaman Keamanan Nasional." *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2): 90–105.
- Siregar, D. P. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Berbasis Teknologi." *Jurnal RechtsVinding*, 11(2): 180–195.
- Wibowo, H. (2018). "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Cybercrime." *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 4(1): 40–55.
- Lestari, R. (2021). "Dampak Psikologis Korban Kejahatan Digital." *Jurnal Psikologi Hukum*, 7(1): 65–80.
- Kurniawan, F. (2020). "Efektivitas UU ITE dalam Menanggulangi Pengancaman Online." *Jurnal Legislasi Nasional*, 16(2): 140–155.
- Hidayat, M. (2019). "Cybercrime dan Tantangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana*, 10(3): 200–215.
- Safitri, N. (2022). "Restorative Justice dalam Kasus Kejahatan Siber." *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2): 95–110.
- Putra, A. D. (2021). "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Digital." *Jurnal Victimologi Indonesia*, 3(1): 30–45.
- Wijaya, R. (2018). "Analisis Yuridis Pengancaman melalui Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2(2): 70–85.
- Susanti, E. (2020). "Perbandingan Penanganan Cybercrime di Asia Tenggara." *Jurnal Hukum Internasional*, 6(1): 115–130.
- Prasetyo, Y. (2023). "Penegakan Hukum terhadap Debt Collector Ilegal di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1): 50–65.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn. Tentang tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam penagihan utang.

